



POLA ORIENTASI DAN SIKAP POLITIK SANTRI PADA PONDOK PESANTREN HUBULO GORONTALO

Kasim Musa¹, Suprisno Baderan²
kasim.musa.71@gmail.com¹, suprisnobaderan@gmail.com²,
Madrasah Aliyah Swasta Hubulo Gorontalo¹
Politik Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo²

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Pola Orientasi dan Sikap Politik Santri di Pesantren Hubulo Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Budaya Politik di Pondok Pesantren Hubulo memiliki ciri khas tersendiri dan telah dilaksanakan dengan sangat baik. Tipe budaya politik santri Pondok Pesantren Hubulo mengarah pada tipe budaya politik Subjektif. Ini karena pesantren adalah komunitas kecil. Dengan masyarakat yang hidup berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Para santri di Pondok Pesantren Hubulo memiliki frekuensi orientasi yang relatif tinggi terhadap pengetahuan tentang sistem politik secara umum dan objek pemahaman tentang pembuatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Para siswa ini merasa menjadi bagian dari warga suatu negara. Mereka juga menaruh perhatian besar pada politik tetapi pasif. Artinya secara emosional mereka tidak merasa praktis terlibat dalam proses dan peristiwa politik yang terjadi. Ketika mereka berbicara tentang masalah politik, cenderung ada perasaan tidak nyaman karena mereka tidak begitu mudah mempercayai orang lain. Selain itu, para santri menganggap ketika berhadapan dengan lembaga negara, mereka merasa lemah dan tidak bisa berbuat banyak.

Kata Kunci: Budaya Politik, Santri, Orientasi Politik

Abstract

This study discusses the Orientation Patterns and Political Attitudes of Santri at the Hubulo Islamic Boarding School, Tapa District, Bone Bolango Regency. The research method used in this research is descriptive qualitative. From the results of the research conducted, it shows that the Political Culture at the Hubulo Islamic Boarding School has its own characteristics and has been carried out very well. The type of political culture of the Hubulo Islamic Boarding School students leads to a type of Subjective political culture. This is because Islamic boarding schools are a small community. With people who live based on the values of Islamic teachings. The students at the Hubulo Islamic Boarding School have a relatively high frequency of orientation towards knowledge of the political system in general and objects of understanding regarding policy making made by the government. These students feel they are part of the citizens of a country. They also pay considerable attention to politics but are passive. This means that emotionally they do not feel practically involved in the processes and political events that occur. When they are talking about political matters, there tends to be a feeling of discomfort because

they don't trust other people so easily. In addition, the santri thought that when dealing with state institutions, they felt weak and could not do much.

Keywords: *Political Culture, Santri, Political Orientation*

Pendahuluan

Dalam kehidupan kita sehari-hari istilah “politik” sudah tidak begitu asing lagi, karena segala sesuatu yang kita lakukan atas dasar kepentingan kelompok atau kekuasaan seringkali diatasmakan dengan label politik. Budaya politik merupakan fenomena dalam masyarakat, yang memiliki pengaruh terhadap struktur dan sistem politik. Sehingga Rusadi dalam membahas budaya politik menyamakan dengan struktur politik, karena berhubungan dengan fungsi konversi (*conversion fuction*), dan kapabilitas (*capabilities*).

Dalam membahas keterkaitan antara budaya politik dengan sistem politik, budaya politik perlu dikedepankan karena menyangkut disiplin ilmu sosial yang berkaitan dengan fenomena masyarakat. Terlebih lagi sistem politik dapat ditinjau sebagai bagian dari ilmu sosial (*social science*), yang hidup *sociosphere* yang merupakan bidang telaah baik sosilogi, antropologi maupun geografi.¹

Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpin politik dan lai-lain. Dalam konteks agama kehidupan sosial kemasyarakatan, hubungan antara Agama dan Politik jelas memiliki suatu keterkaitan, namun tetap harus dibedakan.

Di satu pihak, masyarakat agama memiliki kepentingan mendasar agar agama tidak dikotori oleh kepentingan politik, karena bila agama berada dalam

¹Rusadi Sumintapura, *Sistem Politik Indonesia suatu model pengantar*, (Bandung : Sinar Baru,1988) , h. 25

dominasi politik, maka agama akan sangat mudah diselewengkan. Akibatnya agama tidak lagi menjadi kekuatan pembebas atas berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan, sebaliknya agama akan berkembang menjadi kekuatan yang menindas dan kejam. Dipihak lain, kewajiban moral agama untuk ikut mengarahkan politik agar tidak berkembang menurut selernya sendiri yang bisa membahayakan kehidupan. Agar agama dapat menjalankan peran moral tersebut, maka agama harus dapat mengatasi politik, bukan terlibat langsung ke dalam politik praktis. Karena bila agama berada dalam kooptasi politik, maka agama akan kehilangan kekuatan moralnya yang mampu mengarahkan politik agar tidak berkembang menjadi kekuatan yang menekan kehidupan dan menyimpang dari batas-batas moral dan etika agama, masyarakat, dan hukum.²

Dalam agama Islam Paradigma pemikiran yang berkembang seputar korelasi antara politik dan agama, selalu diwakili dua kutub pemikiran yang bertolak belakang. Qaradhawi mengistilahkannya dengan kelompok sekuler dan kelompok Islamis. Masing-masing kelompok ini intens mengembangkan premis premis yang mendukung pendapatnya dalam berbagai tulisan, buku, dan wacana.

Di Indonesia kita mengenal salah satu kelompok Sosial-Religius yaitu santri. Istilah dan konsep santri telah terkenal akrab dan sering dipakai dalam karya-karya para sarjana tentang sejarah, politik dan masyarakat Jawa. Pondok pesantren merupakan sebuah komunitas kecil masyarakat yang hidup dengan berlandaskan nilai-nilai ajaran agama Islam. Pondok pesantren memiliki peraturan yang mengikat para santri. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk mendidik para santri agar disiplin dan mandiri.

Sehingga setelah menempuh pendidikan di pondok pesantren, santri mampu beradaptasi dengan kehidupan masyarakat. Peraturan pondok pesantren seringkali mengikat santri sehingga tidak memiliki kebebasan sebagaimana remaja umumnya. Keterbatasan santri terutama dalam menggali informasi tentang

²Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI-Press, 2001), h. 4-7

kehidupan masyarakat dapat menimbulkan sikap apatis atau acuh tak acuh terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya termasuk dalam hal politik.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokratis, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik.³ Secara umum partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum dan lain sebagainya.⁴

Peranan pondok pesantren dalam menggalang suara pemilu, menjadikan pesantren sebagai incaran partai politik. Namun, tidak semua pondok pesantren ikut terlibat dalam politik praktis, hal ini tergantung pada pola kepemimpinan kyai sebagai tokoh sentral pondok pesantren. Dalam setiap pemilu, kaum santri adalah kekuatan Sosial dan Politik yang selalu diperhitungkan. Pertautan elit dan santri itu akan membekali legitimasi bagi seorang calon presiden, dan bukan hanya pada calon presiden saja, akan tetapi kesempatan besar bagi partai politik untuk meraih dukungan demi mebesarkan partainya. Hal seperti di atas pernah terjadi di Pondok Pesantren Hubulo Tapa, Bone Bolango.

Kesempatan yang luar biasa tak disia-siakan oleh dua partai besar islam yaitu PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan PKS (Partai Kesejahteraan Sosial) untuk meraih simpati dan dukungan dari para santri di Pondok Pesantren Hubulo Tapa, Bone Bolango. Dalam waktu dan kesempatan yang berbeda, kedua partai tersebut melaksanakan kegiatan dengan dalih kegiatan keagamaan, akan tetapi kegiatan itu tidak lain hanya berisi kandungan dan maksud mempromosikan partainya masing-masing agar mendapat dukungan dan suara yang banyak.

³Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (semarang: ikip semarang press, 1995), h. 67

⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (jakarta: PT. Gramedia pustaka utama, 2008), h. 367

Karena perlu kita ketahui bersama bahwa Pondok Pesantren Hubulo merupakan salah satu Pondok Pesantren besar yang ada di Gorontalo, dan salah satu cabang dari Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta. Maka dari itu kedua Partai tersebut menjadikan Pondok Pesantren Hubulo sebagai Pusat Kegiatan di Wilayah Sulawesi. Dari dulu, sebagai modal sosial, kaum santri hanya menjadi obyek politik karena lemah dari segi modal ekonomi. “Namun demikian, pesantren tetap menjadi basis sosial yang diperhitungkan, menurut pengamat politik Unair Prof. Kacung Maridjan.

Maka berdasarkan pemikiran dan kondisi di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji secara ilmiah bagaimana orientasi dan sikap santri ketika menghadapi permasalahan-permasalahan politik seperti ini. Karena bagi peneliti, permasalahan politik seperti ini selalu ada di seluruh Pondok-Pondok Pesantren di Indonesia. Maka dalam sebuah penelitian ini peneliti akan mengupas lebih detail dengan formulasi judul yaitu : “Pola Orientasi dan Sikap Politik Santri, Pada Pondok Pesantren Hubulo Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango”.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif- non statistik. Penelitian deskriptif adalah “penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan bagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyikapan fakta”.⁵ Hal serupa menurut Borgon dan Tailor adalah prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang diamati sehingga dapat mengungkap masalah-masalah yang diteliti.⁶ Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan sejumlah variabel-variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang sedang diteliti yaitu Budaya Politik Santri pada Pondok Pesantren Hubulo Kabupaten Bone Bolango.

⁵Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Maha peserta Didik* (Jakarta: Graemia Utama, 1997), h.,10.

⁶Lexy. J. Moleong, *penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), h. 112

Sementara Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan sosiologi politik. Pendekatan ini merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang (perspektif) peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori, yang dikonstruksi sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari.⁷

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Pesantren Hubulo

Gorontalo merupakan provinsi yang berpenduduk mayoritas agama Islam, dimana daerah ini terdapat berbagai macam pendidikan Islam. Setiap lembaga, Islam mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas untuk mengukur peningkatan efektif. Salah satu pendidikan Islam yang ada di Provinsi Gorontalo adalah Pondok Pesantren Hubulo.

Pondok Pesantren Hubulo merupakan salah satu lembaga Islam yang berdiri sejak tanggal 12 september 1987 M / 20 Rabi'ul Awal 1408 H. Pondok Pesantren Hubulo melaksanakan pendidikan formal 6 tahun TMI (Tarbiyatul Mu'alimin wal Mu'alimat al-Islamiyah) yang terbagi atas 2 tahap yakni 3 tahun mengikuti Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 3 tahun Madrasah Aliyah (MA).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ
نَفَسَ عَنْ مُعْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“ Dari Abu Hurairah r.a , dari Nabi Muhammad SAW bersabda ; Barang siapa meringankan seseorang mukmin dari beberapa kesedihan yang berkaitan dengan dunia ini, Allah akan meringankan dari dia beberapa kesedihan yang berkaitan akhirat. (H.R Muslim)⁸

⁷Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif, Panduan Membuat Karya Ilmiah* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2012), h.59

⁸*Al-Suyuthi Al-Jami' Al-Shagir min Hadis Al-Basyir Al-Nadzir*. Jilid V, h. 243

Dari potongan hadist tersebut kita wajib membantu dan mencoba yang terbaik untuk meminimalkan konsekuensi dari kesulitan kebutuhan tertentu. Gagasan untuk mendirikan Pesantren Hubulo, sebenarnya telah lahir dari sosok Almarhum Drs. H. Thayib Muhammad Gobel yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Hubulo. Persiapan-persiapan kearah berdirinya pesantren pun telah dilakukan, dan langkah-langkah kongkritpun telah diambil. Akan tetapi karena kehendak Allah, maka sampai akhir hayat beliau, Pesantren Hubulo yang diimpikan belum terwujud. Lahirnya ide dasar untuk mendirikan Pesantren Hubulo, balai pendidikan Islam didasarkan atas keprihatinan Bapak Drs. H. Thayib Muhammad Gobel atas kenyataan bahwa, mayoritas masyarakat Gorontalo memeluk Agama Islam. Kehidupan sehari-hari bernaftaskan Islam. Majelis-majlis ta'lim dan tempat-tempat pengajian yang tidak pernah sepi akan pengunjung. Akan tetapi ironisnya, Kyai dan Ulama sangat sedikit jumlahnya, bahkan lembaga pendidikan semacam pesantren, sebagai tempat mencetak kader Ulama dan Cendikiawan Muslim yang ada di Gorontalo tidak memadai jumlahnya, dibandingkan kebutuhan yang ada.

Oleh karena itu, persoalan *idealisme* ini masih menjadi asa yang belum terwujudkan, sehingga masih mengganjal sampai wafatnya beliau. Beliau dihadapkan dengan dua panggilan dilematis. Panggilan terhadap Allah yang tidak bisa ditunda dan panggilan untuk menegakkan Agama Islam (mendirikan Lembaga Pendidikan Islam) Pondok Pesantren. Panggilan pertama sudah beliau jawab sendiri, sedangkan panggilan kedua beliau wasiatkan kepada putra putri beliau untuk menjawabnya. Sebagai putra putrid yang berbakti kepada kedua orang tuanya maka wasiat dan amanat almarhum diusahakan untuk bisa diwujudkan, walau dengan bekal yang serba terbatas terutama ditinjau dari pengalaman.

Berangkat dari keterbatasan ilmu tentang mendirikan Pesantren, maka dimulailah langkah besar ini. Langkah pertama yang diambil adalah menghimpun putra putri almarhum yang berjumlah tujuh orang itu dalam satu ikatan, Yayasan Keluarga Anie Ebu Gobel. Satu tahun setelah wafatnya Drs. H. Thayib Muhammad Gobel, tepatnya pada tanggal 12 September 1984, namun Pesantren Hubulo baru didirikan tiga tahun kemudian, yaitu pada tanggal 12 September 1987. Selang

waktu tiga tahun itu dimanfaatkan oleh yayasan untuk mempelajari ilmu tentang pesantren. Sekaligus mencari model pendidikan pesantren yang paling cocok/sesuai untuk mengantisipasi perkembangan zaman, bahkan yang sesuai juga dengan kondisi sosial dan budaya Sulawesi, khususnya Sulawesi utara (gorontalo).

Tahap awal sebelum didirikannya Pesantren Hubulo adalah melaksanakan taman pengajian, yang dalam pelaksanaan operasionalnya bekerja sama dengan pesantren Darunnajah Jakarta dengan mengirimkan beberapa pendidik (alumni). Pesantren Hubulo mulai mendidik sepuluh orang santri secara formal, dengan menjadikan taman pengajian sebagai embrio berdirinya pesantren.

Pesantren Hubulo bervisi dan berideologi pancasila dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Bhineka Tunggal Ika, yang didirikan di atas dan untuk kepentingan umat Islam khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya, dengan tidak memandang latar belakang golongan/aliran keagamaan, sosial dan politik. Oleh karena itu, seluruh pribadi yang terlibat dalam proses pendidikan di Pesantren Hubulo ini, harus rela meninggalkan golongan/aliran keagamaan atau sosial politiknya masing-masing. Hal ini berarti tidak turut campur tangan dalam menentukan arah pendidikan dalam Pesantren Hubulo ini.⁹

Pola Orientasi dan Sikap Politik Santri

Pada bagian ini penulis akan membahas secara mendalam tentang Pola Orientasi dan Sikap Politik Santri yang dipengaruhi oleh orientasi individu dalam memandang obyek-obyek politik. Seperti yang dikemukakan oleh Gabriel A. Almond dan Sidney Verba yang mengaitkan budaya politik dengan orientasi dan sikap politik seseorang terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya yang lain, serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem politik. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba melihat bahwa dalam pandangan tentang objek politik terdapat tiga komponen yaitu: Komponen Kognitif, yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan seorang santri terhadap jalannya sistem politik dan atributnya, seperti tokoh-tokoh

⁹<http://www.hubulo.com/halaman/sejarah-pesantren> 20 Februari 2019

pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya, seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lain sebagainya.¹⁰

Komponen Afektif, yaitu menyangkut perasaan seorang warga negara terhadap sistem politik dan peranan yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu. Sedangkan Komponen Evaluatif, yaitu menyangkut keputusan dan praduga tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Eagly dan Chaiken mengemukakan bahwa sikap seorang santri dapat diposisikan sebagai hasil evaluasi terhadap objek politik, yang diekspresikan ke dalam proses-proses kognitif, afektif, dan perilaku. Sebagai hasil evaluasi, sikap yang disimpulkan dari berbagai pengamatan terhadap objek diekspresikan dalam bentuk respon kognitif, afektif (emosi), maupun perilaku.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa informan mulai dari pengasuh Pondok Pesantren baik putra dan putri serta santri yang berada di Pondok Pesantren Hubulo Tapa, Bone Bolango. Maka penulis akan menjabarkan satu persatu seperti apa dan bagaimana Pola Orientasi dan Sikap Politik Santri di Pondok Pesantren Hubulo, sehingga peneliti mudah menyimpulkan tipe Budaya Politik Santri Pada Pondok Pesantren Hubulo jika dikaitkan dengan teori Gabriel Almond dan Sidney Verba.

Budaya politik santri merupakan masyarakat yang menekankan pada aspek-aspek keagamaan, khususnya agama Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia. Kelompok masyarakat santri biasanya diidentikan dengan kelompok masyarakat yang sudah menjalankan ibadah atau ritual agama Islam. Pendidikan mereka ditempuh melalui pendidikan pesantren ,madrasah. Kelompok masyarakat santri biasanya memiliki jenis pekerjaan sebagai pedagang. Kelompok masyarakat santri pada masa lalu sering kali berafiliasi dengan partai NU atau Masyumi, namun

¹⁰Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, (CV. Sinar Biru, Bandung. 1988), h. 25.

pada masa sekarang mereka berafiliasi pada partai, seperti PKS, PKB, PPP, atau partai-partai lainnya yang menjadikan Islam sebagai dasarnya.

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam konteks politik Indonesia, diakui atau tidak, pesantren telah bergeser menjadi salah satu bagian dari media kampanye politik yang mempunyai magnet yang luar biasa. Karena pesantren dianggap strategis karena dikalangan pesantren mempunyai otoritas fatwa politik yang mampu menjadi magnet untuk meyakinkan santrinya, terlebih alumninya sendiri.

Keberadaan pesantren di Indonesia dimulai sejak Islam masuk negeri ini dengan mengadopsi sistem pendidikan keagamaan yang sebenarnya telah lama berkembang sebelum kedatangan Islam. Pesantren tidak hanya berkembang sebagai lembaga yang isinya cuma mengaji dan menelaah kitab-kitap salaf ataupun modern, akan tetapi berperan sebagai komunitas yang mempertahankan tradisional sebagai wajah bagi keaslian budaya Indonesia. Dan pondok pesantren sampai sekarang diakui memiliki saham yang sangat besar terhadap perjalanan sejarah bangsa. Tidak sedikit kontribusi yang diberikan pesantren dalam pembangunan di Negeri ini. hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh informan yaitu Adin Mustofa Lc, M.Pd :

“Tentu Pesantren sangat berpengaruh terhadap sejarah perjalanan bangsa, kita bisa melihat bagaimana kiai-kiai dulu merelakan dirinya untuk membela NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Bahkan rela mati demi bangsa Indonesia, dan bukan hanya itu, di bidang pendidikan kita melihat Pondok Pesantren sangat memperhatikan kondisi anak bangsa yang butuh dengan pendidikan demi bekal mereka kedepan.”¹¹

Pesantren merupakan pusat perubahan dibidang pendidikan, politik, budaya, sosial, dan keagamaan, karena beban Pesantren sangat besar di tengah-tengah masyarakat. Pesantren membawa misi dakwah, karena didalamnya banyak santri yang datang untuk mendalami ilmu pengetahuan agama yang kemudian mereka akan menyebar keseluruh pelosok masyarakat untuk menyebarkan ajaran agama Islam dengan tujuan meraka selain mendapatkan pahala, akan tetapi yang

¹¹Adin Mustofa Lc, M.Pd, *Pembina Pondok Pesantren Hubulo, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Wawancara pada tanggal 25 Maret 2019*

lebih penting adalah pengalaman mereka terjun ke tengah-tengah masyarakat. Di Pesantren Hubulo ada program PPM (Praktek Pengabdian Masyarakat) yang harus dan wajib diikuti oleh santri ketika mereka masuk ke kelas Lima atau kelas dua Aliyah, dan itu untuk melatih mental santri sekaligus beban mereka sebagai *Agen Of Change* atau Agen Perubahan.

Orientasi dan sikap politik santri bersumber dari dua pandangan dasar. Pertama, melihat dunia politik sebagai wilayah yang terbuka bagi partisipasi publik tanpa memandang kualitas keberagamaan. Kedua, melihat dunia politik sebagai realisasi kebenaran agama yang absolut dan hanya dikuasai sekelompok elit keagamaan dengan beragam sebutan seperti ulama, *wilayatul faqih* atau *ahlul halil wal aqdi*. Berdasarkan pandangan kedua, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik hanya melalui wilayah elit keagamaan yang di Indonesia dikenal dengan sebagai kelas kiai dan ulama atau pemimpin gerakan Islam. Inilah penyebab sulitnya santri berkomunikasi terbuka dan dialogis dengan publik.

1. Pola Orientasi dalam Komponen Kongnitif

Pola orientasi dalam komponen kongnitif ini adalah sebuah orientasi yang berdasarkan kepada sebuah pemahaman dan pengetahuan serta keyakinan individu tentang adanya pemahaman sistem politik. Dari beberapa jawaban yang telah peneliti dapatkan dalam wawancara bersama informan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dapat dikatakan bahwa pengetahuan santri terhadap jalannya sistem politik terbilang sangat baik. Seperti yang diungkapkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Hj. Rahmayanti Monoarfa :

“di Pondok Pesantren Hubulo kami selalu berada dalam garda terdepan soal pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena sebagian besar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang tersebut kami adopsi kedalam panca jiwa pesantren hubulo dan kami kombinasikan dengan ajaran agama Islam, dan itu sudah ada semenjak bapak H. Thoyib Gobel dan beberapa kiai dari Pesantren Darunnajah mendirikan pesantren ini.”¹²

¹²Hj. Rahmayanti Monoarfa, *Pimpinan Pondok Pesantren Hubulo, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Wawancara pada tanggal 25 Maret 2019*

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat dilihat bahwa sebagai orang yang taat dalam beragama, dalam hal ini agama Islam, santri di Pondok Pesantren Hubulo taat akan hukum yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena mereka terikat dan terbiasa oleh panca jiwa pesantren yang mana di dalamnya terkandung nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta nilai-nilai ajaran Islam. Pancasila adalah dasar negara yang mempunyai nilai mempersatukan bangsa dari berbagai macam perbedaan, dan Islam pun sangat menghargai perbedaan. Hal senada juga diungkapkan oleh Fauzi SE :

“Bagi saya Pancasila merupakan karakter bangsa Indonesia, yang didalamnya mengandung ajaran-ajaran mulia yang tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam, saling menghargai yang berbeda dgn kita, dan masih banyak lagi nilai-nilai yang baik yang sejalan dengan ajaran Islam. Makanya mengapa Pesantren ini mengadopsi nilai-nilai Pancasila ke dalam panca jiwa pesantren Hubulo”¹³

Pancasila menjadi bintang pemandu bangsa ini. Pancasila juga sudah bertahan dan tumbuh di tengah banyaknya ombak ideologi-ideologi lain yang berusaha menggesernya dan sudah menjadi rumah bangsa Indonesia yang mengaku ber-Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai pondasi Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila menjadi sebuah hal yang suci, sakral, dan sakti. Dalam bingkai sistem politik Indonesia arah, tujuan, serta cita-cita berpusat pada nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai payung hukum yang harus ditaati dan dipatuhi oleh siapapun di negara ini, agar tidak ada lagi semena-mena dalam kebebasan berpolitik. Seperti yang disampaikan oleh salah satu Santri Fadli Suleman saat diwawancarai :

“Sepengetahuan saya kak, Pancasila adalah dasar Negara Indonesia, karena mengandung nilai-nilai yang sangat berguna dan bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kalau Undang-Undang itu adalah hukum-hukum yang berlaku di Indonesia.”¹⁴

¹³Fauzi SE, *Pembina Pondok Pesantren Hubulo, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango*, Wawancara pada tanggal 25 Maret 2019

¹⁴Fadli Suleman, *Santri Pondok Pesantren Hubulo, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango*, Wawancara pada tanggal 26 Maret 2019

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat diambil satu kesimpulan bahwa santri di Pesantren Hubulo Tapa, Bone Bolango memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Mengapa penulis tertarik untuk mengawali menanyakan tentang konstitusi, karena dengan adanya konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara maka kehidupan di negeri ini diharapkan akan lebih teratur dan tidak akan ada benturan-benturan sosial yang diakibatkan oleh konflik kepentingan, antara masyarakat dengan aparatur pemerintahan.

Persoalan pemahaman santri terhadap jalannya sistem politik, penulis menemukan fakta bahwa santri di pesantren Hubulo mempunyai pemahaman yang sangat baik tentang sistem politik. Hal ini dibuktikan dengan jawaban dari para informan pada saat wawancara mengenai sistem politik tentang pemilihan kepala negara. Misalnya wawancara dengan Anang Maulana :

“Seperti yang saya ketahui dan pelajari baik itu di kelas ataupun melihat praktek langsung, bahwa setiap warga negara memilih sesuai dengan kehendak masing-masing, dengan pemikiran dan kesukaannya terhadap calon yang dipilih jadi kepala negara, karena itu hak demokrasi kita”¹⁵

Dari hasil wawancara tersebut kita dapat melihat bahwa pengetahuan santri terhadap sistem politik sangat baik dan merata. dalam hal ini jika kita kaitkan dengan pemilihan kepala negara, mereka sudah paham betul bahwa jalan untuk menjadikan sebuah bangsa yang baik, maju dan dikenal oleh dunia adalah menjalankan hak kita sebagai warga negara untuk memilih pemimpin yang baik dalam bingkai demokrasi.

Kebanyakan orang menganggap bahwa dalam proses belajar mengajar di pesantren hanya berkaitan dengan agama saja, padahal faktanya tidak seperti demikian, seperti yang dikemukakan oleh salah satu informan yakni Rahmatia Jafar :

¹⁵Anang Maulana, *Santri Pondok Pesantren Hubulo, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Wawancara pada tanggal 26 Maret 2019*

“Kami di Pesantren Hubulo ini bukan hanya belajar agama saja, tidak melulu hanya sholat, membaca Al Quran, tapi ada banyak juga kurikulum di Pesantren yang mempelajari tentang ilmu-ilmu pengetahuan sosial, yah kurang lebih seperti sekolah umum lainnya.”¹⁶

Pondok pesantren dihadapkan pada tantangan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa, selain tantangan tersebut pondok pesantren saat ini juga dihadapkan pada kenyataan untuk terlibat dalam kehidupan politik. Terutama dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) baik itu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Legislatif, serta Pilpres.

2. Pola Orientasi dalam Komponen Afektif

Orientasi dalam komponen afektif menunjuk pada aspek yang didasari oleh ikatan emosional atau perasaan yang dipunyai oleh individu pelaku politik dan bagaimana tindakannya terhadap sebuah sistem politik, Apakah itu dapat membuatnya menerima atau menolak terhadap sistem politik keseluruhan. Seperti yang dikemukakan oleh David Easton dalam teori sistem politik, ada input yang berupa masukan dan tuntutan yang akan kemudian di konversi menjadi output berupa kebijakan.

Lingkungan akan melihat positif atau negatif, jika lingkungan berpandangan positif terhadap kebijakan maka akan mendukung kebijakan, tetapi jika lingkungan berpandangan negatif maka akan melahirkan tuntutan atau protes dan implementasi kebijakan dapat dinyatakan gagal. Teori Sistem politik Almond pun memandang bahwa sikap politik dipengaruhi oleh lingkungan yang terbiasa menjadi perilaku politik.

Kita bisa melihat bagaimana perasaan santri di Pondok Pesantren Hubulo terhadap sistem politik di Indonesia khususnya mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam merekrut Tenaga Kerja Asing (TKA), Perasaan kecewa timbul dari diri mereka. Salah satunya santri Syahrul Djailani :

¹⁶Rahmatia Jafar, *Santriwati Pondok Pesantren Hubulo, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango*, Wawancara pada tanggal 27 Maret 2019

“Sangat disayangkan kak, padahal tenaga kerja di Indonesia masih banyak yang bagus, bagi saya pemerintah terlalu cepat mengambil keputusan, kasihan banyak masyarakat yang pengangguran, tidak tahu mau kerja dimana.”¹⁷

Dari jawaban informan tersebut dapat diketahui betapa kecewanya santri terhadap kebijakan pemerintah soal aturan merekrut Tenaga Kerja Asing (TKA), hal ini membuat mereka menaruh kasih terhadap tenaga kerja yang ada di Indonesia yang begitu banyak hidup dalam kesusahan, mereka prihatin terhadap anak bangsa yang begitu banyak yang pengangguran.

Lain halnya dengan santri Moh. Fahriwan Mointi, ketika ditanya mengenai kinerja para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang katanya sudah pada koridor dan menjalankan tugasnya dengan baik.

“Alhamdulillah sampai hari ini kita masih punya wakil-wakil rakyat yang peduli terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, dan kita doakan insya Allah mereka tetap istiqomah dengan tugasnya.”¹⁸

Dari kedua informan tersebut di atas dapat dilihat bahwa apabila santri dihadapkan pada jalannya sistem politik yang menghasilkan sesuatu yang merugikan masyarakat banyak, maka yang timbul adalah perasaan negatif seperti misalnya kekecewaan terhadap Pemerintah. Sebaliknya apabila dihadapkan pada jalannya sistem politik yang menghasilkan sesuatu yang baik bagi masyarakat, maka akan menghasilkan perasaan positif misalnya senang dan bangga.

Berbeda halnya dengan sikap santri terhadap sengketa Pemilu Presiden (Pilpres) kemarin yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), disini peneliti menemukan jawaban yang menarik dari informan atas nama Fahrul Suharto :

¹⁷Syahrul Djailani, *Santri Pondok Pesantren Hubulo, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Wawancara* pada tanggal 26 Maret 2019

¹⁸Moh. Fahriwan Mointi, *Santri Pondok Pesantren Hubulo, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Wawancara* pada tanggal 26 Maret 2019

“sikap kami kak, kami menyerahkan semua keputusan itu sama MK, kalau memang itu adalah keputusan yang sesuai dengan Undang-Undang, kami siap mendukung dan menerima itu dengan penuh kegembiraan. Tapi kalo tidak sesuai dengan Undang-Undang, apalagi keputusan yang memihak salah satu pasangan calon, maka kami akan menolak, dan berharap Allah yang akan memberikan balasan kepada mereka yang tidak berlaku adil.”¹⁹

Perasaan positif dan negatif yang timbul dalam diri santri dapat menentukan orientasi politiknya. Dengan munculnya perasaan positif pada diri santri maka akan menimbulkan “rasa percaya” (*trust*) dan sebaliknya jika perasaan negatif yang muncul maka akan menimbulkan rasa “permusuhan” (*hostility*). Almond dan Powell mencatat bahwa aspek penting yang menentukan orientasi politik seseorang, adalah hal-hal yang berkaitan dengan “rasa percaya” (*trust*) dan “permusuhan” (*hostility*).²⁰

3. Pola Orientasi Dalam Komponen Evaluatif

Orientasi dalam komponen Evaluatif ini berkaitan dengan penilaian moral seseorang terhadap sistem politik. Selain itu, orientasi ini menunjuk pada komitmen terhadap nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan politik baik menggunakan informasi dan perasaan tentang kinerja sistem politik.

Dari komponen inilah dapat kita tentukan tipe dari budaya politik yang ada pada santri di Pondok Pesantren Hubulo Kecamatan Tapa, Bone Bolango. Demi menemukan fakta budaya politik yang ada pada santri di Pondok Pesantren Hubulo ini, penulis memulainya dengan menanyakan penilaian mereka terhadap begitu banyaknya partai-partai politik yang ada di Indonesia. Seperti wawancara bersama Raihana Adila Khonsa :

“bagi saya syukurlah kita punya jumlah partai yang banyak, dan saya setuju kalo lebih banyak lagi, karena dengan itu masyarakat terbantu untuk meyalurkan aspirasinya melalui jalan partai tersebut. Tetapi jangan hanya sekedar mengumpulkan banyak massa, kualitas partainya tidak jelas.”²¹

¹⁹ Fahrul Suharto, *Santri Pondok Pesantren Hubulo, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Wawancara* pada tanggal 08 Juli 2019

²⁰ Almond, Gabriel. A and Powell, Bingham. Op.Cit, h. 42

²¹ Raihana Adila Khonsa, *Santriwati Pondok Pesantren Hubulo, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Wawancara* pada tanggal 27 Maret 2019

Dari hasil wawancara bersama informan di atas dapat dilihat bahwa penilaian atau dukungan mereka terhadap banyaknya partai di Indonesia itu sangat kuat, karena dengan anggapan bahwa banyaknya partai bisa menyalurkan aspirasi masyarakat. Tetapi dengan syarat partai yang punya kualitas yang baik, bukan hanya sekedar mengumpulkan banyak massa terus kualitas partainya tidak baik.

Jika kita kaitkan dengan teori budaya politik Almond dan Verba, pada umumnya kecenderungan budaya politik santri Pondok Pesantren Hubulo Kecamatan Tapa, Bone Bolango masih tergolong Budaya politik Subyek/Kaula. Artinya mereka memiliki frekuensi orientasi-orientasi yang tinggi terhadap sistem politiknya, namun perhatian dan intensitas orientasi mereka hanya terhadap aspek masukan (*input*), dan partisipasinya dalam aspek keluaran (*output*) sangat rendah.²² Dalam hal ini dapat diartikan bahwa santri secara sadar mengikuti pemberitaan politik, namun mereka tidak akan berkomentar mengenai pemberitaan tersebut karena merasa hal itu tidak akan berpengaruh apapun.

Hal yang menguatkan lagi bahwa dalam aspek output santri sangat rendah dilihat dari jawaban informan ketika ditanyai mengenai apa yang mereka lakukan ketika melihat keputusan Mahkamah Agung yang membolehkan mantan koruptor untuk ikut dalam pemilihan umum. Seperti wawancara bersama Faralisa Zakia Suleman :

“menurut saya sangat aneh kak, itu adalah keputusan yang tidak sesuai. Karena kita tahu bersama kalau sudah pernah mencuri (korupsi), pasti akan melakukan hal yang sama kalau dia terpilih. Yaah.. tapi apalah daya, itu sudah jadi keputusan, kami juga tidak punya kekuatan untuk menuntut, karena posisi kami di dalam pesantren. Jadi hanya bisa melihat dan memperhatikan saja.”²³

Berdasarkan jawaban santri tersebut dapat dilihat bahwa santri tidak dapat melakukan apa-apa terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah. Hal ini diakibatkan oleh kondisi santri yang berada di dalam lingkungan pesantren yang

²²Almond, dan Sidney Verba, Op.Cit, h. 20-22

²³Faralisa Zakia Suleman, *Santriwati Pondok Pesantren Hubulo, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Wawancara pada tanggal 27 Maret 2019*

mereka anggap tidak memungkinkan untuk menyampaikan aspirasi, dan juga posisi santri yang setingkat pelajar mereka anggap sebagai posisi yang tidak tepat untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan Negara.

Tapi ada juga santri yang berpendapat bahwa walaupun mereka berusaha untuk bertindak tidak akan mempengaruhi atau mengubah kebijakan yang telah diambil oleh negara. Sebab keadaan mereka sebagai santri yang tinggal di pondok pesantren, sehingga tidak mampu berbuat apa-apa tanpa izin dari pimpinan pondok pesantren. Seperti yang disampaikan oleh informan Fadli Suleman :

“sekalipun kami bisa keluar, pasti akan bertentangan dengan pimpinan, karena pasti tidak akan disetujui dan tidak akan diberi izin untuk menyampaikan aspirasi kami, beliau menganggap aspirasi kami tidak berpengaruh dan tidak bermanfaat.”²⁴

Dari penjelasan diatas mengenai Pola Orientasi dan Sikap Politik Santri Pada Pondok Pesantren Hubulo, maka penulis menyimpulkan bahwa santri di Pondok Pesantren Hubulo memiliki frekuensi orientasi yang relatif tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek pemahaman mengenai pembuatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan merasa mereka adalah bagian dari warga suatu negara. Mereka juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap politik tetapi sifatnya pasif.

Disaat yang sama ketika keluar kebijakan negara yang menurut mereka tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat banyak, mereka kemudian merasa lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka meyakini bahwa posisinya tidak akan menentukan apa-apa terhadap perubahan politik dan juga beranggapan bahwa dirinya adalah subyek yang tidak berdaya untuk mempengaruhi ataupun mengubah sistem. Dengan demikian secara umum mereka menerima segala keputusan yang diambil dari segala kebijaksanaan pejabat bersifat mutlak, tidak dapat diubah-ubah, dikoreksi, apalagi ditentang. Bagi mereka yang prinsip adalah mematuhi perintahnya, menerima, loyal, dan setia terhadap anjuran, perintah, serta kebiaksanaan pimpinannya dalam pesantren.

²⁴Fadli Suleman, *Santri Pondok Pesantren Hubulo, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango*, Wawancara pada tanggal 26 Maret 2019

Faktor-Faktor Terbentuknya Budaya Politik Santri

Mencermati keunggulan utama dari konsep budaya politik adalah untuk menunjukkan bahwa perilaku politik harus dilihat dalam konteks budaya. Perilaku politik ini disutradarai oleh interpretasi dan preferensi, bukan oleh fakta-fakta yang memperlihatkan kepentingan dan kekuasaan. Gagasan tentang budaya menekankan pentingnya makna, interpretasi, pembenaran, wacana dan lebih umumnya faktor kognitif dan afektif yang menjadi dasar tidak terjadinya minimalisme budaya politik. Menurut Duffield istilah budaya politik telah digunakan untuk menandakan orientasi subjektif ke arah dan asumsi tentang dunia politik yang mencirikan anggota masyarakat tertentu dan panduan untuk menginformasikan perilaku politik mereka.

Teori Budaya Politik yang telah dikemukakan Gabriel Almond mengenai ide-ide dasar yang terkandung dalam budaya politik, bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh manusia adalah mempunyai tujuan serta didasarkan pada pertimbangan dan penafsiran seseorang terhadap sesuatu hal, maka penulis akan mencoba menganalisa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi budaya politik santri pada Pondok Pesantren Hubulo, Kecamatan Tapa, Bone Bolango dikaitkan dengan teori Gabriel Almond.

Penulis dalam penelitiannya menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi Budaya Politik Santri di Pondok Pesantren Hubulo, yaitu diantaranya adalah karena faktor Kepemimpinan Kiai, Faktor Media Massa, dan Faktor Lingkungan. Disini peneliti akan menjelaskan satu persatu apa dan bagaimana ketiga faktor tersebut sangat berpengaruh.

1) Kepemimpinan Kiai

Dalam status sosial santri mengacu pada segelongan muslim jawa yang mengatakan kebaktian yang paling sungguh-sungguh kepada agama islam, dengan menjalankan ibadah sholat, puasa, haji, dan seterusnya.²⁵ Keberadaan santri tak lepas dari posisi kiai, hubungan antar kiai dan santri tergambar seperti pola hubungan antara individu yang *autokrat* dengan individu yang *abdikrat*.

²⁵Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2014), h. 21

Hubungan seperti ini melahirkan ketaatan para santri kepada kiai secara mutlak tanpa *reverse*, kiai dianggap sebagai sumber keberkahan hidup.²⁶

Pola kepemimpinan kiai ini bagi peneliti berpengaruh terhadap terbentuknya budaya politik santri di Pondok Pesantren Hubulo, karena sifat kiai yang disegani di lingkungan pesantren membuat santri tak punya kuasa untuk merespon segala permasalahan sistem politik yang terjadi dan yang berkembang di masyarakat, baik itu kebijakan pemerintah, maupun masalah-masalah politik lainnya.

Seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya pada point Pola Orientasi dan Sikap Politik santri diatas, pada orientasi komponen evaluatif ketika santri diberikan pertanyaan mengenai sengketa pemilu presiden kemarin, maka salah satu penyebab yang membuat orientasi budaya politik santri hanya sebatas *input*, dan tak berani mengambil langkah *output*, ternyata salah satu penyebabnya adalah karena ketaatan dan ketakdziman mereka sangat tinggi terhadap sosok kiai, sehingga membuat mereka tak berani mengambil langkah output lebih jauh.

2) Faktor Media Massa

Media massa mempunyai peran sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Peran komunikasi sangat menentukan dalam penyampaian informasi maupun suatu kebijakan pemerintah. Media massa dapat merubah gaya hidup atau budaya lokal setempat, dengan cara mempengaruhi cara berfikir suatu kelompok atau kalangan masyarakat tertentu agar menyukai atau mengikuti suatu hal yang baru atau asing bagi mereka. Dan pengaruh dari media massa tersebut dapat berdampak positif maupun negatif.

Dalam akses keterampilan ini akan memberikan berbagai sumber informasi politik yang dapat disaring dengan baik, misalkan informasi politik melalui media massa dianggap memainkan peran penting dalam mengubah dasar perilaku orientasi politik santri . Nah, selain ketaatan dan ketakdziman santri kepada sosok kiai yang menjadi penyebab pada dasarnya terbentuknya

²⁶Chumaidi Syarief Roma, *Kekerasan di Kerajaan Syurgawi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), h. 91

budaya politik santri dalam dunia masyarakat pesantren, maka akses ke media massa juga salah satu penyebabnya, karena dari informasi-informasi yang mereka dapatakan dari media massa tersebut dapat mengubah pola perilaku santri dan sikap politik santri terhadap masalah-masalah politik yang terjadi.

Perlu peneliti sampaikan bahwa ada beberapa media massa yang ada dilingkungan Pondok Pesantren Hubulo, diantaranya adalah Koran Gorontalo Post yang disediakan oleh pesantren untuk asrama santri putra dan asrama santri putri agar para santri bisa mengakses perkembangan informasi yang terjadi diluar pesantren, kemudian santri diizinkan menggunakan barang elektronik dalam hal ini Laptop yang mereka gunakan disetiap hari libur sekloah/pesantren, dan yang terakhir adalah Televisi disetiap asrama putra dan putri.

3) Faktor Lingkungan

Posisi santri sebagai pelajar sangat berbeda dengan pelajar secara umum, hal ini disebabkan kondisi santri yang harus tinggal di dalam lingkungan pondok pesantren sehingga terikat dengan peraturan pondok pesantren yang begitu ketat. Berbeda dengan pelajar pada umumnya, mereka memiliki kebebasan untuk merespon hal-hal yang terjadi diluar tentang masalah-masalah politik bahkan mereka bisa keluar untuk menuntut jika sesuatu yang terjadi tidak sejalan dengan mereka, baik itu sistem politik dan lain sebagainya, karena mereka tidak memiliki keterikatan dengan peraturan. Namun, sebenarnya santri ini memiliki antusiasme yang sama sebagaimana pelajar pada umumnya untuk berpartisipasi dalam sistem politik.

Hal ini dibuktikan dengan beberapa fakta yang telah peneliti jelaskan pada point Orientasi dan Sikap Politik santri diatas, dalam komponen orientasi evaluatif ketika peneliti mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana reaksi mereka terhadap keputusan Mahkamah Agung terhadap mantan koruptor diperbolehkan mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Seperti wawancara peneliti bersama informan Faralisa Suleman, dari jawaban informan, peneliti menyimpulkan, bahwa faktor lingkungan memang sangat mempengaruhi budaya politik santri pada pondok pesantren hubulo, dari segi input budaya

politik mereka sangat tinggi, tapi untuk outpunya merka sangat lemah, dan kelemahan itu dipengaruhi oleh lingkungan pesantren yang mengikat mereka dengan aturan-aturan yang berlaku di Pondok Pesantren Hubulo.

Dari beberapa faktor yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas, maka peneliti berkesimpulan bahwa terbentuknya budaya politik santri pada Pondok Pesantren Hubulo, karena disebabkan oleh kondisi dan situasi santri yang mana dilain pihak mereka paham dan peduli ketika ada sistem politik atau permasalahan politik yang terjadi di luar lingkungan mereka, tapi ketika permasalahan itu membutuhkan langkah output, mereka tak punya kuasa.

Maka berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh ini, peneliti bisa menyimpulkan dengan mengacu pada penjelasan yang telah dikemukakan diatas bahwa orientasi politik kaum santri pada Pondok Pesantren Hubulo termasuk pada budaya politik subyek. Budaya Politik ini memiliki frekuensi orientasi-orientasi yang tinggi terhadap sistem politiknya, namun perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan (*input*) dan partisipasinya dalam aspek keluaran (*output*) sangat rendah.

Hal ini dikarenakan oleh peran santri yang terbatas, dan menganggap diri mereka tidak punya kuasa untuk menuntut segala kebijakan sistem politik yang dihasilkan oleh pemerintah. Santri menganggap bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh sama sekali, karena posisi mereka berbeda dengan sekolah-sekolah umum lainnya yang siswanya diberikan kebebasan dan keleluasaan. Sementara santri punya aturan yang megikat mereka di Pondok pesantren.

Subjek individual menyadari akan otoritas pemerintah yang memiliki spesialisasi, ia bahkan secara afektif mengorientasikan diri kepadanya, ia memiliki kebanggan terhadapnya atau sebaliknya tidak menyukainya, dan ia menilainya sebagai otoritas yang absah. Namun demikian, posisinya sebagai subyek (kaula) mereka pandang sebagai posisi yang pasif. Jika dikaitkan dengan teori Gabriel Almond dan Sidney Verba. Hal tersebut diindikasikan oleh peran serta santri dalam hal politik yang tidak cukup besar jika dilihat dari

segi orientasi berdasarkan komponen-komponen yang telah di jelaskan sebelumnya.

Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dipaparkan sebelumnya oleh peneliti mengenai Pola Orientasi dan Sikap Politik Santri Pada Pondok Pesantren Hubulo Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Boalango. Maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain yakni:

1. Dilihat dari pola orintasi dan sikap politik santri pada Pondok Pesantren Hubulo, terlihat bahwa Santri pada Pondok Pesantren Hubulo memiliki orientasi politik yang sangat tinggi, dan partisipasi politik yang sangat besar terhadap hal-hal yang berkenaan dengan sistem politik.
2. Tingkat orientasi yang sangat tinggi dari Santri pada Pondok Pesantren Hubulo tersebut hanya bersifat input karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor kepemimpinan kiai, faktor media massa, dan faktor lingkungan. Faktor-faktor ini menjadi penentu yang sangat dominan mempengaruhi orientasi politik Santri.

Oleh karena itu, berdasarakan kesimpulan dari hasil analisis, penulis merumuskan beberapa saran tentang budaya politik santri yaitu :

1. Perlu adanya upaya meningkatkan pengetahuan santri perihal politik, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dan keaktifan santri dalam berorganisasi. Karena hal itu sangat penting sehingga santri tidak hanya menjadi penonton di panggung teater negara atau hanya menerima informasi secara mentah.
2. Untuk para politikus atau elit-elit partai, hendaknya tidak memanfaatkan pondok pesantren sebagai alat politik atau ladang politik demi meraup suara atau dukungan.
3. Sistem pendidikan pesantren harus selalu berupaya melakukan rekonstruksi pemahaman terhadap ajaran yang dilakukan agar tetap relevan dan *survive* menghadapi perkembangan zaman, bahkan lebih

lanjut Pesantren harus mampu mewujudkan system sinergi dengan kondisi dan perkembangan masyarakat yang ada, yakni sistem yang memadukan akar tradisi dan modernitas. Jika ini berhasil dilakukan hubungan pesantren dengan dunia lain pun akan menjadi lebih baik.

Daftar Pustaka

- Almond, dan Sidney Verba, *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Jakarta: Bumi Aksara 1990
- Budiardjo, Miriam. *dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Chilcote. H. Ronald, Chilcote, “*Teori Perbandingan Politik*” Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Dhofier. Zamkhasyari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: Mizan
- Gaffar. Afan, *Politik Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Hadad. Ismid, *Budaya Politik dan Keadilan Soisal* Jakarta: LP3ES, 1979
- I.H. Rahman A, *Sistem politik Indonesia* ,Yogyakarta; GrahaIlmu, 2007
- Ikbar. Yanuar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif, Panduan Membuat Karya Ilmiah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012
- J. S. Kras, *Attitudes and Prediction of Behavior, Personality and Social Psychology Bulletin*, Januari, 1995
- Kantaprawira. Rusadi, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Bandung: CV. Sinar Biru, 1988
- Moleong, Lexy. J, Moleong, *penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001
- Madjid. Nurcholish, *Bilik-bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan* Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1977
- Mar’at, *Sikap Manusia: Perubahan serta Pengukurannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
- Nasution. Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* Jakarta: UI-Press, 2001
- Nasution. Harun, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Depag RI, 1993

- Nazir. M, *Metode Penelitian*, Jakarta:Gahlia Indonesia, 2010
- Notoatmodjo, S. *Ilmu Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Rahmanan Nahlawi, *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam*, Bandung: CV. Dipenegoro, 1992
- Rahman. Arifin, *Sistem Politik Indonesia*, SIC, Surabaya, 2002
- Ridha. Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Jilid II Mesir; Maktabah al-Qahirah.
- Sukamto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren* Jakarta: Pustaka LP3ES, 1999
- Sumintapura. Rusadi, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung :Sinar Baru, 1988
- Sastroatmodjo. Sudijono, *perilaku politik*, Semarang: Ikip Semarang Press, 1995
- Wahjono. Padmo, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Grafindo Persada, 2011
- Wasito. Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Maha peserta Didik*, Jakarta: Grademia Utama, 1997
- Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholish Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional* Jakarta: Ciputat Press, 2005